

Katalog : 4102004.7325

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Luwu Timur

2019



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LUWU TIMUR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Luwu Timur 2019



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019

ISBN: 978-602-6842-35-0

Nomor Publikasi: 73250.2022

Katalog: 4102004.7325

Ukuran Buku: 18,2 x 25,7 cm

Jumlah Halaman: x + 50 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

Desain Kover oleh:

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

Sumber Ilustrasi:

ANTARA FOTO

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di daerah ini. Selain itu, juga diharapkan sebagai bahan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya di bidang sosial.

Publikasi ini memuat berbagai indikator antara lain, Indikator Kependudukan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, dan Kemiskinan. Indikator-indikator tersebut, secara umum dapat menggambarkan tingkat Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Luwu Timur.

Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memuaskan semua konsumen data. Saran yang konstruktif tetap diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Malili, Desember 2020

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LUWU TIMUR**



Muhlis SE, M.Si

Daftar Isi

	hal	
Kependudukan	1	
Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin		
Sebaran dan Kepadatan Penduduk	11	Kesehatan dan Gizi
Angka Beban Ketergantungan		Derajat dan Status Kesehatan Penduduk
Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama		Sarana dan Prasarana Kesehatan
Penggunaan Alat/Cara KB		Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan
Pendidikan	21	
Harapan Lama Sekolah (HLS)		
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	30	Ketenagakerjaan
Angka Partisipasi Murni (APM)		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Status Pekerjaan Utama
Taraf dan Pola Konsumsi	38	Jumlah Jam Kerja
Pengeluaran Rumah Tangga		
	40	Perumahan dan Lingkungan
		Kualitas Rumah Tinggal
Kemiskinan	45	Fasilitas Rumah Tinggal
Perkembangan Penduduk Miskin		Status Kepemilikan Rumah Tinggal
Garis Kemiskinan(GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan(P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan(P2)		

Daftar Tabel

- 2 | Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015-2019
- 5 | Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2019
- 7 | Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2019
- 9 | Tabel 1.4 Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2019
- 10 | Tabel 1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2019
- 16 | Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Tahun 2017 - 2018
- 17 | Tabel 2.2 Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan, Tahun 2017 dan 2018 (Persen)
- 19 | Tabel 2.3 Persentase Perempuan berumur 15-49 tahun Menurut Penolong Persalinan, 2018
- 32 | Tabel 4.1 Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Kegiatan di Kabupaten Luwu Timur, 2017-2019
- 33 | Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan menurut Jenis Kelamin, di Kabupaten Luwu Timur, 2018-2019
- 34 | Tabel 4.3 Tingkat Partisipasi Terbuka menurut Jenis Kelamin, di Kabupaten Luwu Timur, 2018-2019
- 37 | Tabel 4.4 Persentase Penduduk Menurut Jam Kerja Per Minggu di Kabupaten Luwu Timur, 2018
- 39 | Tabel 5.1 Pengeluaran Penduduk Menurut Kategori di Kabupaten Luwu Timur (Rupiah) Tahun 2018
- 42 | Tabel 6.1 Rumah Tinggal menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Luwu Timur, 2017-2018
- 43 | Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Luwu timur, 2017-2018

44 | Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan
Rumah Tinggal di Kabupaten Luwu Timur, 2017-2018

<https://luwutimurkab.bps.go.id>

Daftar Gambar

- 3 Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Luwu Timur, 2015-2019
- 6 Gambar 1.2 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, 2019
- 13 Gambar 2.1 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Luwu Timur, 2014-2019
- 23 Gambar 3.1 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Laju Pertumbuhan HLS Kabupaten Luwu Timur, 2014-2019
- 25 Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Laju Pertumbuhan RLS Kabupaten Luwu Timur, 2014-2019
- 27 Gambar 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Kabupaten Luwu Timur, 2018-2019
- 28 Gambar 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kabupaten Luwu Timur, 2018-2019
- 47 Gambar 7.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur, 2014-2019
- 48 Gambar 7.2 Garis Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur, 2014-2019
- 49 Gambar 7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Luwu Timur, 2014-2019

BAB I

KEPENDUDUKAN

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Sejak abad ke tujuh belas, hubungan manusia dengan pembangunan selalu menjadi perdebatan. Sekelompok pakar berpendapat bahwa Penduduk mendukung pembangunan. Ada juga kelompok pakar yang justru berpendapat bahwa penduduk menghambat pembangunan. Sebagian yang lain menyatakan bahwa penduduk tidak mempunyai pengaruh terhadap pembangunan.

Selain berbagai perdebatan di atas, sejak tahun 1950-an banyak teori yang berhubungan dengan penduduk dan pembangunan. Teori Coale-Hoover menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menghambat pembangunan sosial ekonomi, sehingga perlu kebijakan pengendalian jumlah penduduk. Sedangkan Revisionist Theory (1980's) menganggap bahwa kependudukan tidak mempengaruhi proses pembangunan ekonomi, masih banyak isu-isu lain yang lebih penting.

Pada kenyataannya, jumlah dan pertumbuhan penduduk akan sangat berpengaruh pada proses pembangunan. Kondisi kependudukan Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Luwu Timur pada khususnya secara tidak langsung berpengaruh pada pembangunan.

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019 berdasarkan Hasil Proyeksi SP2010 telah menembus angka 299.673 jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan sekitar 5.851 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan dalam lima tahun terakhir, penduduk Kabupaten Luwu Timur bertambah sekitar 24.078 jiwa.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015-2019

Rincian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki (jiwa)	141.687	144.912	147.984	151.020	154.006
Perempuan (jiwa)	133.908	136.910	139.890	142.802	145.667
Jumlah Penduduk (jiwa)	275.595	281.822	287.874	293.822	299.673
Pertumbuhan Penduduk (%)	2,30	2,26	2,15	2,07	1,99
Rasio Jenis Kelamin	105,81	105,84	105,79	105,75	105,72

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2035

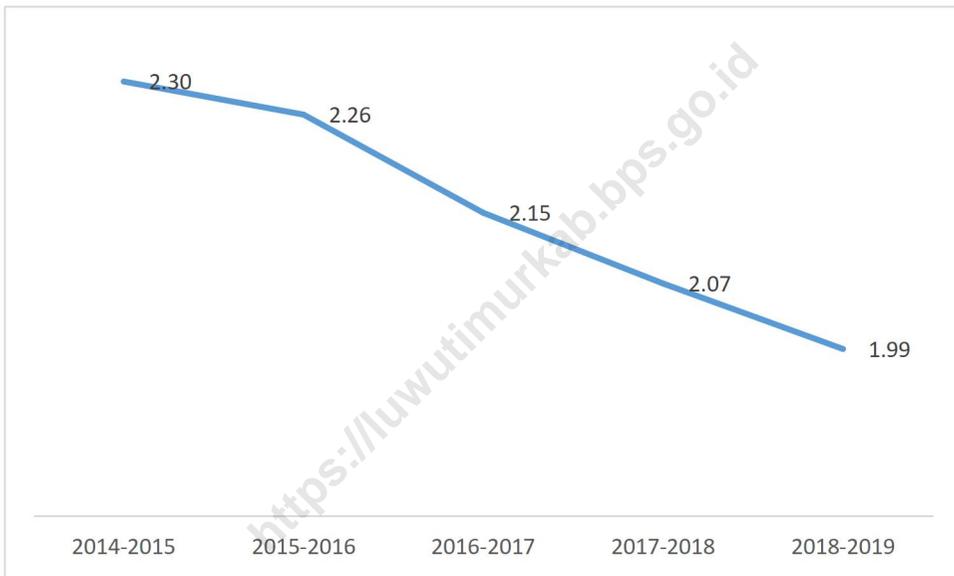
Penduduk Kabupaten Luwu Timur yang terus bertambah dan tidak dipungkiri akan memberikan dampak positif dan negatif. Jumlah penduduk yang besar merupakan indikator tersedianya tenaga kerja yang cukup memadai. Hal ini juga dikuatkan dengan jumlah penduduk usia produktif (15 sampai dengan 64 tahun) yang mendominasi sebesar 64,33 persen dari seluruh penduduk. Tetapi, jumlah tenaga kerja yang besar ini berpotensi menaikkan tingkat pengangguran. Jumlah tenaga kerja yang besar membutuhkan penyediaan lapangan kerja yang besar juga. Jika pertumbuhan lapangan kerja baru tidak mampu mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja, maka jumlah pengangguran akan meningkat.

Jumlah penduduk yang relatif besar juga berdampak pada penyediaan bahan makanan dan berbagai fasilitas hidup layak. Ada ungkapan yang mengatakan: 'Keberhasilan pemerintah dapat dilihat dari rakyatnya yang tidak kelaparan'. Pemerintah harus mampu meningkatkan stabilitas pangan untuk mencukupi kebutuhan seluruh penduduknya. Karena salah satu indikator kesejahteraan penduduk yang utama sangat berhubungan dengan kebutuhan

dasar manusia, yaitu pemenuhan akan makanan pokok. Pertumbuhan produksi pangan harus sebanding dengan pertumbuhan penduduk.

Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, berarti pemerintah juga harus terus menambah jumlah fasilitas hidup layak bagi masyarakatnya. Dua fasilitas yang paling mendasar adalah fasilitas pendidikan dan kesehatan. Karena dua hal tersebut akan menentukan kualitas manusia seutuhnya.

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Luwu Timur, 2015-2019



Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2035

Dilihat selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu Timur melambat dengan rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1,99 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi akan membawa dampak terhadap pembangunan, termasuk dalam penentuan kebijakan kependudukan. Dengan jumlah penduduk yang relative tinggi, penentuan kebijakan harus mempertimbangkan banyak hal. Seperti misalnya, penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi kebijakan bidang kependudukan tersebut.

Selama tahun 2014-2018 laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Luwu Timur terus mengalami penurunan. Terakhir pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu Timur berada pada angka 1,99 persen. Secara rata-rata selama lima tahun terakhir berada pada kisaran 2,15 persen. Namun, alangkah baiknya jika laju pertumbuhan penduduk semakin menurun hingga mencapai angka kurang dari satu persen. Hal ini mengacu pada beberapa pendapat yang mengelompokkan negara- negara berdasarkan LPP. Data membuktikan bahwa untuk negara-negara maju, selalu memiliki LPP kurang dari satu persen bahkan mendekati nol persen. Hal ini karena jumlah penduduk secara tidak langsung berbanding terbalik dengan usaha dalam menjaga kualitas sumber daya manusia.

Pertumbuhan penduduk yang kurang terkendali akan menimbulkan berbagai masalah baik pengangguran, kemiskinan, tingkat kualitas SDM, kejahatan, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Hal ini bisa saja memberikan dampak negatif pada upaya peningkatan kualitas SDM. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah penduduk yang besar juga merupakan modal dan aset pembangunan.

Selanjutnya jika melihat komposisi penduduk menurut jenis kelaminnya, rasio jenis kelamin di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019 sebesar 105,72. Angka ini mengandung arti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan, ada sebanyak 105 atau 106 orang penduduk laki-laki. Dengan kata lain, penduduk laki-laki di wilayah ini lebih banyak dibanding penduduk perempuan.

Dengan mengetahui rasio jenis kelamin, akan dapat diidentifikasi komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Informasi ini digunakan untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Dahulu, karena adat dan kebiasaan, pendidikan laki-laki lebih diutamakan daripada pendidikan perempuan. Oleh karena itu, di masa sekarang, pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui jumlah laki-laki dan perempuan di kelompok umur yang sama.

Selain itu, informasi mengenai rasio jenis kelamin juga penting diketahui dalam dunia politik terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Sebaran dan Kepadatan Penduduk

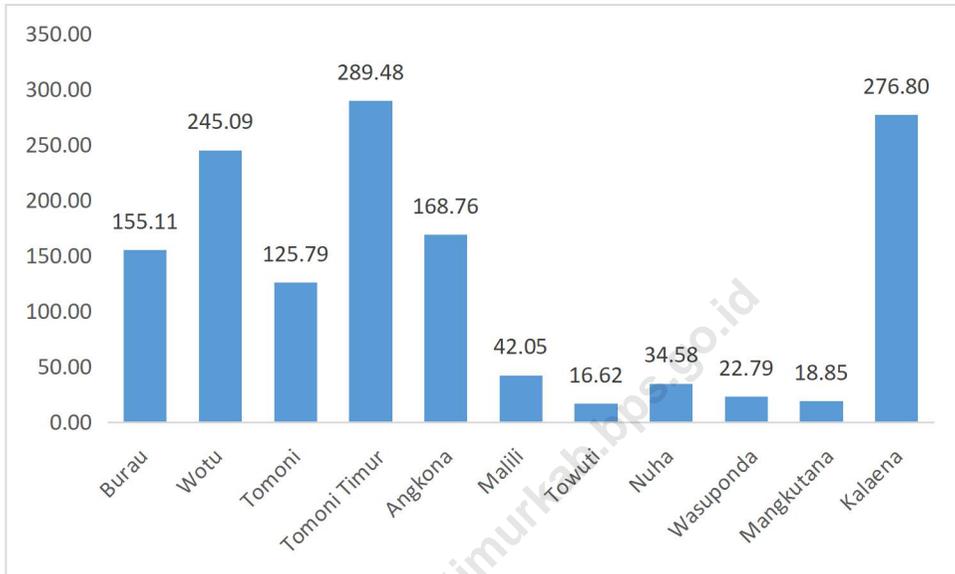
Pada tahun 2019 penduduk Kabupaten Luwu Timur diperkirakan berjumlah 299.673 jiwa yang tersebar pada 11 kecamatan. Kabupaten ini memiliki wilayah terluas kedua se Sulawesi Selatan, yakni sebesar 15,18 persen dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 kepadatan penduduknya masih berada pada kisaran 39 jiwa per km² sedangkan pada tahun 2019 kepadatan penduduknya mencapai 43,15 jiwa per km².

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2019

Kecamatan	Penduduk			Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
	L	P	L+P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
Burau	20.146	19.598	39.744	256,23	155,11	102,80
Wotu	16.057	15.932	31.989	130,52	245,09	100,78
Tomoni	14.791	14.153	28.944	230,09	125,79	104,51
Tomoni Timur	6.471	6.240	12.711	43,91	289,48	103,71
Angkona	12.764	12.084	24.848	147,24	168,76	105,63
Malili	20.042	18.699	38.741	921,2	42,05	107,18
Towuti	15.948	14.311	30.259	1.820,48	16,62	111,44
Nuha	14.602	13.345	27.947	808,27	34,58	109,42
Wasuponda	14.895	13.450	28.345	1.244,00	22,79	110,74
Mangkutana	12.447	12.078	24.525	1.300,96	18,85	103,06
Kalaena	5.843	5.777	11.620	41,98	276,80	101,14
Luwu Timur	154.006	145.667	299.673	6.944,88	43,15	105,72

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2035 dan Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2020

Gambar 1.2 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, 2019



Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2035 dan Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2020

Apabila dilihat menurut kecamatan, berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2019, maka kecamatan dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan Tomoni Timur. Sementara kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Towuti.

Angka Beban Ketergantungan

Angka beban ketergantungan atau Angka Beban Tanggungan penduduk adalah perbandingan penduduk yang tidak produktif (usia kurang dari 15 tahun dan umur 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15–64 tahun). Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Selama periode 2017-2019 angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 angka beban tanggungan Kabupaten Luwu Timur sebesar 55,83 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 56 penduduk usia tidak produktif. Pada tahun 2018 angka beban ketergantungan penduduk turun menjadi 55,45 persen kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 55,13 persen. Artinya, pada tahun 2019, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 55 sampai 56 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2019

Rincian	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Penduduk (%)	287.874	293.822	299.673
0-14 tahun	91.036	92.209	93.368
15-64 tahun	184.738	189.013	193.171
65+ tahun	12.100	12.600	13.134
Angka Beban Ketergantungan	55,83	55,45	55,13

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2035

Penurunan rasio ketergantungan memberikan peluang yang disebut bonus demografi. Dimana bonus demografi tersebut terjadi jika nilai rasio ketergantungan dibawah 50 persen. Bonus demografi dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan, the window of opportunity (Adieotomo, 2004) atau jendela kesempatan yang akan terbuka ketika rasio ketergantungan mencapai titik

terendah. Kondisi ini hanya terjadi satu kali dalam sejarah suatu penduduk. Keadaan ini akan memberikan kondisi ideal untuk membangun karena pada saat tersebut suplai tenaga kerja sangat besar. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang mereka tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Intinya, bonus demografi tersebut akan memberikan dampak yang positif dalam pembangunan jika ledakan penduduk usia kerja mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga mereka dapat hidup sejahtera dan mampu menyisihkan uang untuk ditabung. Dan diharapkan dari tabungan tersebut dapat meningkatkan investasi untuk perluasan kesempatan kerja. Jika hal ini terjadi, maka bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal, mengingat kondisi ini hanya terjadi satu kali dalam sejarah suatu penduduk.

Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat fertilitas, karena semakin tinggi umur perkawinan, khususnya wanita menyebabkan masa reproduksinya lebih pendek. Jika masa reproduksinya lebih pendek, maka kemungkinan jumlah anak dapat dibatasi. Hal ini berarti pula bahwa penundaan perkawinan mengakibatkan berkurangnya peluang wanita untuk melahirkan anak lebih banyak. Karena salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk adalah tingginya angka kelahiran di suatu daerah.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2019 di Kabupaten Luwu Timur, persentase wanita berusia 10 tahun ke atas yang melakukan perkawinan pertamanya pada umur 16 tahun ke bawah sebesar 15,80 persen. Rendahnya persentase wanita yang menikah pada umur 16 tahun ke bawah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai usia ideal untuk melakukan perkawinan pertama cukup tinggi. Pada usia kurang dari 16 tahun, seseorang masih dapat dikatakan sebagai anak-anak yang belum siap untuk membina sebuah keluarga.

Sebagian besar wanita melakukan perkawinan pertama pada usia diatas 21 tahun. Pada tahun 2019 persentasenya mencapai angka 43,22 persen. Kedepannya, pemerintah perlu menggalakkan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan. Usia perkawinan penting bukan hanya terkait pengendalian pertumbuhan penduduk, tetapi juga terkait dengan kesehatan reproduksi pada wanita. Wanita yang menikah terlalu muda, alat reproduksinya belum siap dan berpeluang besar menyebabkan kehamilan yang bermasalah. Dengan kata lain, secara tidak langsung perkawinan usia muda berpeluang meningkatkan angka kematian ibu saat melahirkan. Terlebih jika wanita tersebut tinggal di daerah dengan akses terhadap fasilitas kesehatan yang tidak memadai.

Tabel 1.4 Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2019

Tahun	≤16 tahun	17-18 tahun	19-20 tahun	>20 tahun	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2018	15,78	18,50	21,50	44,22	100
2019	15,80	17,13	23,85	43,22	100

Sumber : Susenas 2018-2019 (Publikasi Statistik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan 2019)

Penggunaan Alat/Cara KB

Tabel 1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2019

Alat/Cara Kontrasepsi	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
MOW/Tubektomi	0,53	0,58	3,44
MOP/Vasektomi	0	0	0,11
AKDR/IUD/Spiral	8,59	10,06	5,11
Suntikan KB	35,68	35,37	29,42
Susuk	22,32	26,57	...
Pil	29,45	20,13	16,91
Kondom	1,21	3,73	2,76
Intravag	0	0	...
Alat/cara KB Tradisional	1,05	3,56	...
Lainnya	1,18	0	...

Sumber : Susenas 2017-2019 (Publikasi Statistik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan 2019)

BAB II

KESEHATAN DAN GIZI

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas.

Perhatian pemerintah terhadap kesehatan semakin ditingkatkan terutama pada ibu hamil dan balita. Perhatian tersebut diwujudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan diharapkan semakin baik dengan adanya fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat, sehingga dapat secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan perubahan pola pikir tentang pola hidup sehat.

Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat; menurunkan angka kematian ibu dan bayi; menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang; dan meningkatkan angka harapan hidup. Keberadaan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan adanya bidan di desa akan mempengaruhi masyarakat sekitarnya untuk hidup sehat. Selain itu, semua lapisan masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang relatif mudah, murah dan merata.

Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau. Caranya adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya

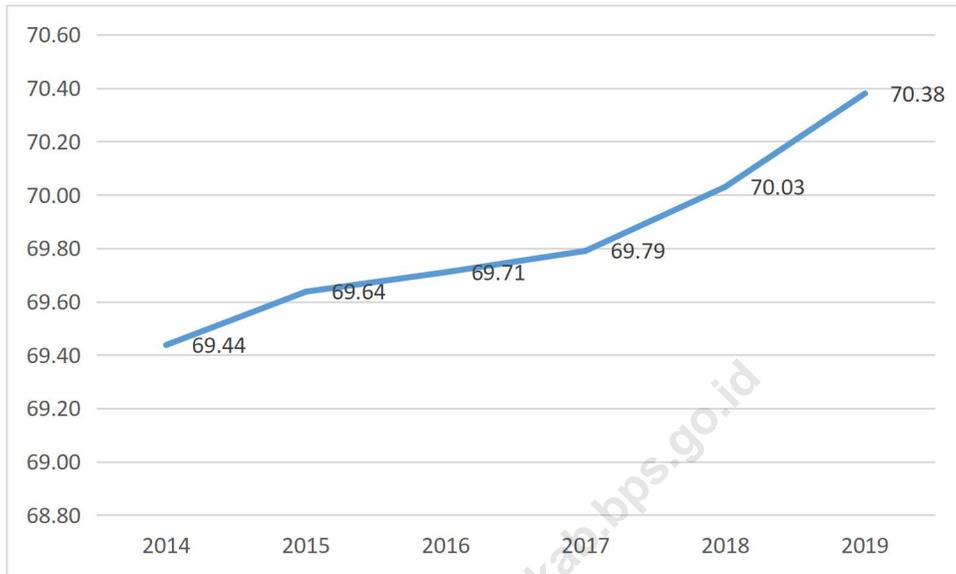
kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes, dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain: angka harapan hidup; angka kesakitan; dan indikator lainnya. Berbagai indikator lainnya tersebut berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti: persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis; persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya; serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup, selain angka kesakitan masyarakat yang merepresentasikan sejauh mana tingkat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur semakin meningkat, yang ditandai dengan peningkatan Umur Harapan Hidup, tercatat dari berumur 69,44 tahun pada tahun 2014 menjadi 70,38 tahun di tahun 2019. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau Life Expectancy (e0) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Gambar 2.1 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Luwu Timur, 2014-2019



Sumber : Publikasi Data Strategis Kabupaten Luwu Timur 2020

Peningkatan Umur Harapan Hidup ini karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: faktor-faktor perilaku masyarakat, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi perlu dijalankan antar intersektoral dengan menyertakan peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), maka morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan

berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Di Tahun 2018, penduduk yang mengeluh terhadap kesehatannya meningkat dibanding 2017, dari 14,43 persen menjadi 16,53 persen. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, angka kesakitan perempuan cenderung lebih tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk perempuan lebih sensitif terhadap rasa sakit. Pada tahun 2018 persentase perempuan yang menderita sakit selama sebulan terakhir sekitar 17,83 persen, sementara laki-laki sekitar 15,3 persen.

Sarana dan Prasarana Kesehatan

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas, tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis pelayanan kesehatan.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam akses fasilitas kesehatan adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya, serta jenis pelayanan kesehatan. Dari beberapa

alternative fasilitas kesehatan, ternyata puskesmas/pustu lebih diminati oleh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Ketersediaan, kemudahan akses serta biaya menjadi pendorong tingginya minat masyarakat untuk berobat di puskesmas/pustu.

Keberadaan Puskesmas sangat strategis dalam pelayanan kesehatan di pedesaan. Puskesmas adalah satu unit pelayanan fungsional yang fungsi utamanya adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan, yang biasanya dibangun dengan melihat kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografi dan infrastruktur lainnya. Penguatan puskesmas juga merupakan awal dari program kesehatan gratis yang diterapkan oleh pemerintah.

Peningkatan akses puskesmas oleh masyarakat tampak dari persentase penduduk yang berobat jalan di puskesmas, yaitu dari 54,38 persen di tahun 2017 menjadi 69,09 persen di tahun 2018. Selain puskesmas/pustu, masyarakat memilih praktek dokter, bidan atau klinik sebagai alternative lainnya, dimana persentasenya di tahun 2018 mencapai 13,06 persen. Alasan penduduk memilih berobat ke puskesmas dan praktek dokter/klinik adalah karena kedua fasilitas pelayanan kesehatan tersebut mudah dijangkau dan tersedia sampai ke pedesaan.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat, 2017 - 2018

Tempat Berobat Jalan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit Pemerintah	12,34	7,59
Rumah Sakit Swasta	8,87	6,02
Praktik Dokter/Bidan	17,77	13,06
Klinik/Praktik Dokter Bersama	6,95	4,61
Puskesmas Pustu	54,38	69,09
UKBM	2,56	0,77
Praktik Pengobatan Tradisional	1,83	0,94
Lainnya	0,8	1,85

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur

Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat termasuk yang tidak mampu tentunya sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit biasanya berada di ibukota kabupaten, sedangkan untuk melayani masyarakat di pedesaan biasanya tersedia fasilitas pelayanan kesehatan berupa Puskesmas.

Sementara itu, penduduk yang berobat ke pengobatan tradisional dan lainnya merupakan yang terkecil, dimana masing-masing hanya sebesar 0,94 persen dan 1,85 persen di tahun 2018. Fakta ini mengindikasikan semakin baiknya pemahaman penduduk tentang kesehatan. Karena pada dasarnya, berobat ke fasilitas kesehatan lebih masuk akal dan ilmiah dibanding berobat ke pengobatan tradisional dan lainnya.

Ketiadaan biaya pengobatan secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) yang dimulai pada Januari 2014 diberlakukan bagi seluruh penduduk Indonesia tak terkecuali penduduk Kabupaten Luwu Timur, tujuannya mengatasi kendala biaya pengobatan. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory). Hal ini berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.

Sampai saat ini, pelaksanaan JKN semakin direspon cukup positif oleh masyarakat. Dari data Susenas menunjukkan penduduk Kabupaten Luwu Timur yang tidak menggunakan jaminan kesehatan semakin berkurang. Di tahun 2017, penduduk yang tidak menggunakan jaminan kesehatan masih sekitar 13,99 persen, turun menjadi sekitar 11,48 persen di tahun 2018.

Tabel 2.2 Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan, Tahun 2017 dan 2018 (Persen)

Jenis Jaminan Kesehatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
BPJS Kesehatan PBI	26,53	62,51
BPJS Kesehatan non PBI	29,1	19,89
Jamkesda	30,33	3,3
Asuransi Swasta	0,39	-
Perusahaan Kantor	1,2	3,89
Tidak Menggunakan	13,99	11,48

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Penolong persalinan sangat berpengaruh terhadap keselamatan serta kesehatan bayi dan ibu pada saat proses persalinan. Penolong persalinan yang

berkualitas tentunya lebih memungkinkan terwujudnya keselamatan dan kesehatan bayi serta ibu pada saat persalinan. Tenaga medis sebagai penolong persalinan tentunya lebih baik dibanding tenaga non medis.

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 telah ditetapkan dalam Perpres No. 5 tahun 2010 yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Kualitas tenaga kesehatan sangat ditentukan oleh spesifikasi pendidikan yang dimiliki yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang akan diberikan pada masyarakat. Dengan semakin bertambahnya tenaga kesehatan diharapkan derajat kesehatan masyarakat akan semakin meningkat juga ditunjang dengan kesadaran akan kebersihan lingkungan sebagai faktor utamanya. Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil, dimana persentase balita yang penolong proses kelahiran terakhirnya adalah tenaga kesehatan mencapai 99,72 persen pada tahun 2018. Artinya, dari 10 kelahiran bayi setidaknya 9 diantaranya ditolong oleh tenaga kesehatan. Atau dengan kata lain, hanya satu kelahiran bayi yang mungkin ditolong oleh selain tenaga kesehatan.

Jika melihat jumlah tenaga kesehatan, jumlah bidan lebih banyak dibanding dokter. Selain itu, banyak daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh dokter. Untuk daerah tersebut, bidan berperan sebagai pengganti dokter. Selain bidan lebih dekat dengan masyarakat, biaya melahirkan dibidan diduga lebih hemat dibanding melahirkan dibantu oleh dokter. Bahkan di beberapa daerah, kadang

dokter akan turun tangan membantu untuk persalinan yang tidak normal atau beresiko tinggi. Dalam hal ini, bidan merupakan pertolongan pertama untuk meminimalisir resiko kematian ibu melahirkan. Bidan berada di barisan terdepan untuk membantu ibu melahirkan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Oleh karena itulah wajar bila sebagian besar penolong persalinan adalah bidan dengan persentase 71,24 persen di tahun 2018.

Tabel 2.3 Persentase Perempuan berumur 15-49 tahun Menurut Penolong Persalinan, 2018

Penolong Persalinan (1)	2018 (2)
Tenaga Kesehatan	99,72
Dokter	28,48
Bidan	71,24
Perawat	0
Bukan Tenaga Kesehatan	5,85
Dukun Tradisional	5,85
Lainnya/Tidak Ada	0

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur

Perhatian pemerintah pada tenaga penolong persalinan sudah cukup baik karena apabila penolong persalinan bukanlah tenaga kesehatan maka akan memiliki resiko buruk terhadap tingginya tingkat kematian ibu dan anak yang biasanya dilakukan oleh tenaga yang belum terlatih seperti famili/keluarga yang bukan merupakan tenaga medis. Dukun tradisional, meskipun bukan tenaga medis, tetap dirangkul oleh pemerintah, karena perannya yang tidak bias dikesampingkan, utamanya pada daerah yang tidak terjangkau tenaga medis. Upaya pemerintah adalah membekali dukun persalinan dengan ilmu kesehatan oleh bidan-bidan desa.

Ketersediaan tenaga kesehatan medis yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terus diusahakan oleh pemerintah. Tercermin dari sasaran dalam Renstra Kementerian Kesehatan dalam hal sumber daya kesehatan adalah menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan dan menekankan pada Standar Pelayanan Dasar bidang kesehatan secara efektif dan efisien.

<https://luwutimurkab.bps.go.id>

BAB III

PENDIDIKAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tujuan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari pengertian dan tujuan pendidikan terlihat jelas pentingnya pendidikan bagi diri sendiri, masyarakat luas, maupun demi kelangsungan bangsa.

Pendidikan juga menjadi salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDG's). Tercantum dalam tujuan ke – 4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Tujuan 4 ini dibentuk dengan harapan untuk menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. Pendidikan berkualitas merupakan prinsip dasar pembangunan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Disamping itu, akses untuk memperoleh kesempatan belajar yang sama dan merata dalam setiap jenjang pendidikan selama hidup diharapkan dapat dicapai dari tujuan 4.

Tujuan besar bangsa Indonesia tertera dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu segala kebijakan pendidikan haruslah mengarah pada satu tujuan tersebut. Hal ini bersesuaian dengan pasal 28C UUD 1945 yang menyatakan bahwa (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan (2)

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 49 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang berbunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Hal tersebut mengindikasikan adanya keseriusan pemerintah terhadap pendidikan dengan mengalokasi dana yang tidak sedikit demi tercapainya tujuan pendidikan.

Namun pada kenyataannya, masih jauh dari angan-angan dan harapan. Masih banyak permasalahan hadir di dunia pendidikan meskipun berbagai program pendidikan telah dijalankan. Kenaikan beberapa indikator seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berjalan lambat. Pendidikan bukanlah barang instan dalam mencapainya. Melainkan proyek jangka panjang yang bahkan akan terus berlangsung selama negara ini berdiri. Sehingga konsistensi dalam terus melakukan perbaikan sangat diperlukan. Mulai dari kualitas pendidik, sistem pendidikan, kurikulum yang digunakan, siswa, birokrasi pendidikan, penggunaan anggaran, hingga segala hal yang terkait dengan proses mendidik. Karena tidak ada negara maju yang tidak memperhatikan pendidikannya.

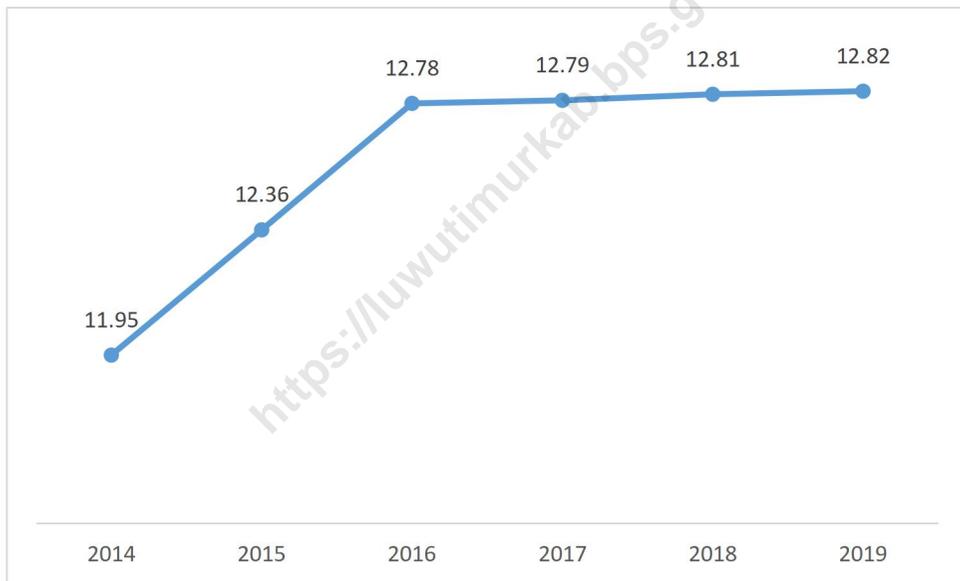
Harapan Lama Sekolah (HLS)/Expected Years of Schooling (EYS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Expected Years of Schooling (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar sejak usia 7 tahun. Untuk mengakomodasi penduduk

yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

HLS Kabupaten Luwu Timur tahun 2018 sebesar 12,81 tahun. Artinya secara rata- rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2018 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,81 tahun atau setara dengan Diploma I Sejak tahun 2011, harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Luwu Timur terus mengalami peningkatan.

Gambar 3.1 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Laju Pertumbuhan HLS Kabupaten Luwu Timur, 2014-2019



Sumber : Publikasi Data Strategis Kabupaten Luwu Timur 2020

Dari data Harapan Lama Hidup (HLS) Kabupaten Luwu Timur selama delapan tahun terakhir, menunjukkan adanya peningkatan meskipun adanya perlambatan pada laju pertumbuhannya. Di tahun 2014 HLS Kabupaten Luwu Timur mencapai 11,95 tahun setara dengan belum lulus SMA, sedangkan di tahun 2019 HLS Kabupaten Luwu Timur mencapai 12,82 tahun setara dengan kuliah Diploma I.

Pada tahun 2014 hingga 2016 terjadi percepatan menjadi 2,73 persen per tahun. Kemudian mengalami perlambatan hingga tahun 2019 yaitu sebesar 0,08 persen.

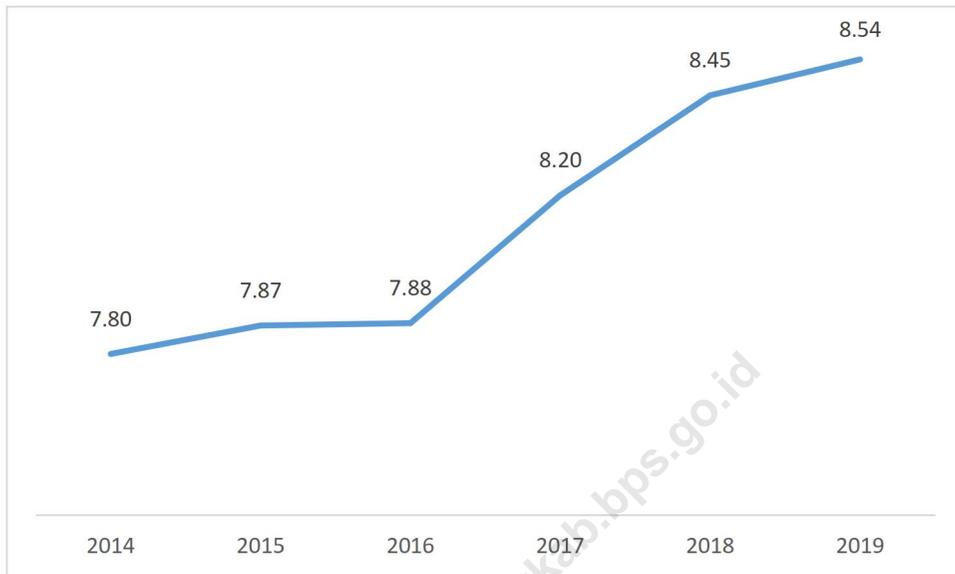
Rata Lama Sekolah (RLS)/Mean Years of Schooling (MYS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS) didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka ini berguna untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi pencapaian dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lama sekolah, semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP lama sekolah 9 tahun, tamat SMA lama sekolah 12 tahun, tanpa memperhitungkan pernah tinggal kelas atau tidak.

Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. RLS digunakan untuk pada IPM dengan metode lama maupun baru guna mengukur pada dimensi pendidikan. Tetapi terdapat perbedaan mendasar dalam definisi RLS ini. Dimana pada IPM metode lama, RLS dihitung untuk penduduk usia 15 tahun keatas. Sedangkan dari metode baru, RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Salah satu upaya pemerintah yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada RLS adalah meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi. Terutama untuk jenjang pascasarjana yang memiliki peluang besar untuk penduduk usia di atas 25 tahun. Selain itu, pemerintah Sulawesi Selatan juga mencanangkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3, serta gratis peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui boarding school untuk Guru SD, SMP, SMA, guru mengaji, muballig, khatib, dan alim ulama.

Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Laju Pertumbuhan RLS Kabupaten Luwu Timur, 2014-2019



Sumber : Publikasi Data Strategis Kabupaten Luwu Timur 2020

Dari data Rata-rata Lama Hidup (RLS) Kabupaten Luwu Timur selama delapan tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan meskipun pertumbuhannya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 RLS Kabupaten Luwu Timur mencapai 8,54 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,54 tahun atau sedang menempuh pendidikan SMP kelas 3.

Pertumbuhan RLS Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2014 hingga 2019 cenderung lambat hingga tahun 2016 dan terus meningkat hingga tahun 2018. Pertumbuhan RLS tertinggi terdapat pada tahun 2017 (4,06 persen) sedangkan terendah terdapat pada tahun 2016 (0,13 persen).

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

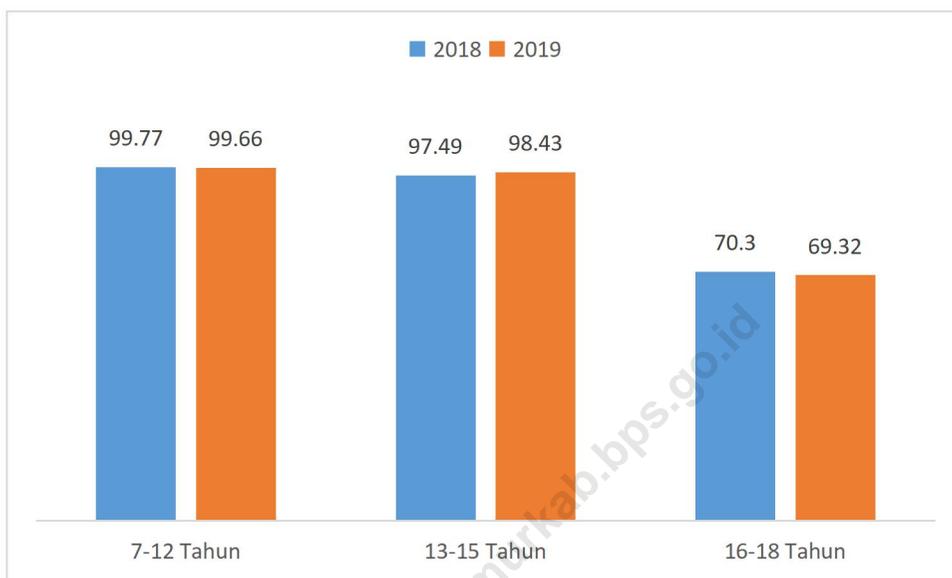
Kekayaan suatu negara terletak pada pengetahuan rakyatnya. Itulah mengapa dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan salah satu tujuan nasional kita

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali harus bisa mengakses pendidikan sebaik-baiknya. Dalam pembahasan ini, gambaran akses penduduk terhadap pendidikan diukur dengan angka partisipasi sekolah.

Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai, tanpa melihat jenjang pendidikan apa yang sedang ditempuh. Sejak tahun 2009, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan perannya dalam menentukan APS. Umur penduduk dalam penghitungan APS pada tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama umur 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua umur 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP, dan kelompok ketiga umur 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SMA/SMK. Meningkatnya APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Gambar 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Kabupaten Luwu Timur, 2018-2019



Sumber : Publikasi Data Strategis Kabupaten Luwu Timur 2020

Pada tahun 2019 APS Kabupaten luwu timur meningkat untuk kelompok umur 13-15 tahun. Sementara untuk kelompok umur 7-12 tahun dan 16-18 tahun sedikit menurun. Adanya ketimpangan APS dari SD, SMP/SLTP, dan SMA/SMK menunjukkan perlu ada penelitian lebih lanjut guna mengurangi ketimpangan yang ada.

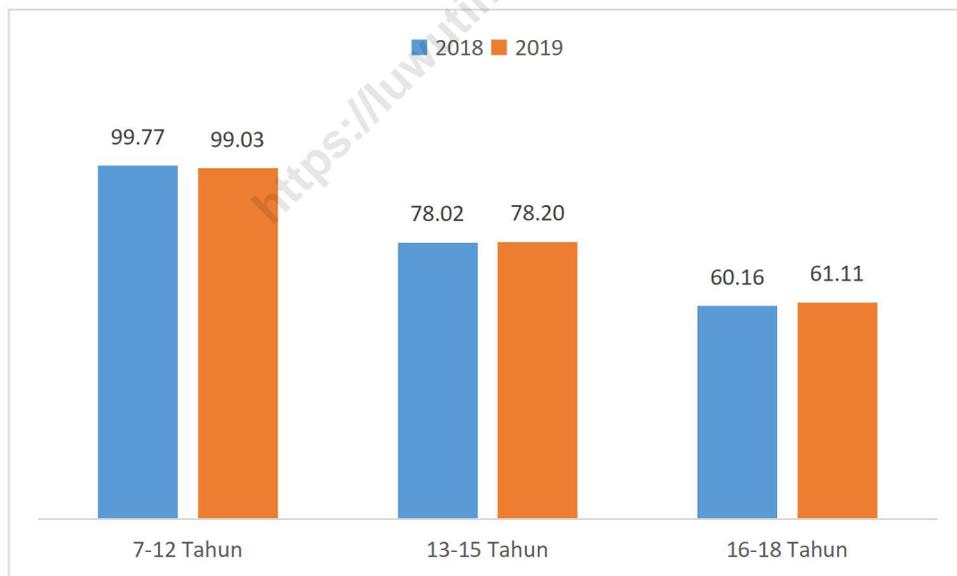
Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator selain APS yang dapat dikatakan lebih halus dalam perhitungannya. Jika APS tidak memperhitungkan jenjang pendidikan apa yang sedang ditempuh oleh anak usia sekolah, APM ini hanya memasukkan anak yang sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya. APM SD untuk anak usia 7-12 tahun yang sedang sekolah di jenjang SD, APM SMP untuk anak usia 13-15 tahun yang sedang sekolah di jenjang SMP, dan

APM SMA/ SMK untuk usia 16-18 tahun yang sedang sekolah di jenjang SMA/SMK. Sehingga APM akan lebih rendah daripada APS.

Menurut definisi, Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Tujuan dari perhitungan APM adalah untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh

Gambar 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kabupaten Luwu Timur, 2018-2019



Sumber : Publikasi Data Strategis Kabupaten Luwu Timur 2020

Jika melihat perkembangan APM di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2018 hingga tahun 2019, terlihat adanya kenaikan pada jenjang SMP dan SMA. APM SMP

dan SMA dari tahun 2018 ke 2019 berturut-turut naik 0,18 poin dan 0,95 poin. Sementara pada jenjang SD mengalami penurunan sebesar 0,74 poin.

Berdasarkan jenis kelamin, pada jenjang SD, APM penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Sementara pada jenjang SMA penduduk perempuan memiliki nilai APM lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki.

<https://luwutimurkab.bps.go.id>

BAB IV

KETENAGAKERJAAN

Agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang lebih dikenal dengan istilah SDG's (Sustainable Development Goals), memaparkan 17 Tujuan. Tujuan ke delapan SDG's menitikberatkan pada 'Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua'. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan lebih baik, serta memberikan jaminan ekonomi yang lebih besar bagi semua penduduk. Disamping itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan upah antar penduduk yang bekerja. Salah satu indikator dalam tujuan SDG's yang terkait dengan ketenagakerjaan menyebutkan akan mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya pada tahun 2030.

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin dengan menitikberatkan pada masalah perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja. Kemudian sejauh mana pemerintah mengambil strategi seperti itu dan menjalankannya seefektif mungkin, telah dianggap sebagai salah satu batu ujian yang penting artinya bagi keberhasilan pembangunan.

Pentingnya peranan tenaga kerja dalam proses rutin dan pertumbuhan ekonomi tidak mungkin dan tidak pernah terlupakan. Karena tenaga kerja mempunyai dua sisi yang saling melekat satu sama lain. Sisi yang satu

mengambil peranan fungsional dalam proses produksi yaitu bertindak sebagai faktor produksi. Sisi lain merupakan terminal dari semua kegiatan produksi yaitu sebagai konsumen penerima pendapatan yang bersumber dari proses produksi.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya yang telah memasuki usia kerja, diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian.

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tabel 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan di Kabupaten Luwu Timur, 2017-2019

Kegiatan Utama	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Angkatan Kerja	138.367	144.010	137.236
- Bekerja	134.795	140.865	131.634
- Pengangguran Terbuka	3.572	3.145	5.602
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)	70,03	71,21	66,52
3. Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	2,58	2,18	4,08

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur yang termasuk dalam usia kerja pada tahun 2019 sebanyak 206.298 orang, meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 202.227 orang. Dari jumlah tersebut, yang tergolong dalam angkatan kerja sejumlah 137.236 orang yang terdiri dari 131.634 orang penduduk yang bekerja dan 5.602 orang penduduk yang menganggur. Jumlah penduduk bekerja berkurang 9.231 orang sedangkan pengangguran bertambah sebanyak 2457 orang dari tahun sebelumnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga yang aktif dalam kegiatan ekonomi.

Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur, 2018-2019

Jenis Kelamin	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	88,22	85,57
Perempuan	53,07	46,20
Laki-laki + Perempuan	71,21	66,52

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2019 sebesar 66,52 persen cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, TPAK Luwu Timur mencapai 70,03 persen yang kemudian mengalami kenaikan menjadi 71,21 persen di tahun 2018. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2019, TPAK perempuan sebesar 46,20 sedangkan laki-laki sebesar 85,57 persen yakni hampir dua kali lebih besar dibanding TPAK perempuan.

Partisipasi penduduk laki-laki cenderung lebih tinggi dibanding penduduk perempuan, hal tersebut juga tergambar dalam TPAK dimana TPAK laki-laki selalu berada di atas TPAK perempuan. Selama dua tahun terakhir, TPAK laki-laki mencapai lebih dari 80 persen sementara TPAK perempuan jauh berada di bawahnya yakni hanya berkisar 53 persen. Lebih rendahnya TPAK perempuan dibandingkan laki-laki merupakan hal yang wajar mengingat secara umum perempuan bukanlah tumpuan ekonomi keluarga.

Tabel 4.3 Tingkat Partisipasi Terbuka menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur, 2018-2019

Jenis Kelamin	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	1,75	4,51
Perempuan	2,95	3,24
Laki-laki + Perempuan	2,18	4,08

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pengangguran terbuka cenderung mengalami peningkatan, yaitu sekitar 3.145 penganggur pada tahun 2018 menjadi 5.602 penganggur pada tahun 2019. Jumlah penganggur tersebut berdampak pada besarnya indikator TPT. Pada Agustus 2019 angka TPT Luwu Timur adalah sebesar 4,08 persen, angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,9 persen poin dari tahun 2018

Status Pekerjaan Utama

Berbicara mengenai status pekerjaan, selama dua tahun terakhir jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan masih paling besar dibandingkan status pekerjaan yang lain. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan adalah sebesar 38,88 persen pada tahun 2019. Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 26,98.

Selanjutnya, status pekerjaan utama yang memiliki persentase terbesar kedua adalah penduduk bekerja yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga. Tercatat sebesar 18,56 persen penduduk Kabupaten Luwu Timur bekerja sebagai pengusaha yang dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga pada tahun 2019. Angka tersebut menurundibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 25,34.

Secara persentase, dalam kurun waktu 2018-2019 terjadi fluktuasi jumlah pekerja pada status pekerjaan utama. Jika dilihat dari status pekerjaan yang terbanyak di Luwu Timur adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai (38,88 persen); berusaha sendiri (19,22 persen); berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (18,56 persen); dan pekerja keluarga/tak dibayar (13,62 persen). Sedangkan penduduk yang bekerja sebagai pekerja bebas di non pertanian memiliki persentase terkecil yaitu 1,59 persen disusul berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar (3,45 persen) dan pekerja bebas di pertanian (4,67 persen). Besarnya jumlah tenaga kerja dengan status pekerjaan utama adalah berusaha menunjukkan bahwa pekerja di Kabupaten Luwu Timur tidak hanya terpaku pada pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai tetapi sebagian besar pekerja memiliki keinginan untuk memiliki usaha sendiri bahkan hingga menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain.

Secara sederhana kegiatan formal dan informal diidentifikasi menurut status pekerjaan. Pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga/tak dibayar. Selebihnya merupakan pekerja formal. Dalam dua tahun terakhir, pekerja formal mengalami peningkatan dari tahun 2018. Penduduk yang bekerja di sektor informal adalah sebanyak 75.912 pekerja (57,67 persen) pada tahun 2019, selama setahun terakhir mengalami penurunan sebesar 12,61 persen sedangkan di sektor formal penduduk bekerja sebanyak 55.722 orang, mengalami kenaikan sebesar 12,61 persen dari tahun 2018.

Jumlah Jam Kerja

Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pekerja tidak penuh jika mereka bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam). Seseorang yang dikategorikan sebagai pekerja tidak penuh ada dua macam, yakni: setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Setengah penganggur (*under employment*) jika mereka bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam) tetapi bukan atas kerelaan. Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan di bawah kemampuan sebenarnya. Selain itu seseorang yang terpaksa bekerja di bawah 35 jam merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian atau keterampilannya. Artinya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menambah jam kerja.

Selanjutnya, pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja secara harian dan menerima upah menurut jumlah jam kerja atau hari kerja, atau menurut jumlah barang atau jasa yang diselesaikan. Perbedaannya dengan setengah pengangguran adalah mereka bekerja di bawah 35 jam atas dasar kerelaan. Artinya bukan karena tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, tetapi lebih karena pilihan. Jadi banyak pekerja paruh waktu yang memiliki pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sementara itu, seorang bekerja penuh (*full time worker*) adalah mereka yang bekerja 35 jam perminggu atau bahkan lebih. Mereka dikategorikan sebagai bukan setengah pengangguran karena memiliki jumlah jam kerja normal selama seminggu (minimal 35 jam). Pada tahun 2018, penduduk Kabupaten Luwu Timur yang bekerja penuh atau lebih dari 35 jam adalah sebesar 65,16 persen dari total pekerja di Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk Menurut Jam Kerja Per Minggu di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018

Jam Kerja per Minggu	2018
(1)	(2)
0	0,95
1-14	9,05
15-34	24,84
35+	65,16

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur

BAB V

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Taraf dan pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu dari sekian indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan dibanding non makanan, mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran Rumah Tangga

Jenis pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluarannya. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini terlihat pada kelompok penduduk dengan tingkat konsumsi makanannya yang mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau untuk ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1 Pengeluaran Penduduk Menurut Kategori di Kabupaten Luwu Timur (Rupiah) Tahun 2018

Jenis Pengeluaran	2018
(1)	(2)
Makanan	512.070
Bukan Makanan	559.630
Jumlah	1.071.700

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur

Tabel 4.2 menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan pada tahun 2018. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata pengeluaran satu orang penduduk selama sebulan adalah pada kisaran angka satu juta rupiah. Apabila dilihat dari jenis pengeluarannya penduduk Kabupaten Luwu Timur lebih banyak mengalokasikan untuk konsumsi non makan dibandingkan konsumsi makanan. Tercatat di tahun 2018, pengeluaran konsumsi non makanan, pengeluaran konsumsi non makanan penduduk Luwu Timur mencapai 52,22 persen dari total pengeluaran keseluruhan.

BAB VI

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah beserta fasilitas dan lingkungannya merupakan kebutuhan dasar, juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembentukan watak dan kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah berfungsi pula sebagai sarana pengaman dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengaman bukan berarti menutup diri melainkan tetap harus membuka diri dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal berpengaruh terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen Nomor 9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya

pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material rumah seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Berdasarkan data Susenas, persentase rumah tangga Kabupaten Luwu Timur yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah meningkat dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2018, rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 98,51 persen.

Tabel 6.1 Rumah Tinggal Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Luwu Timur, 2017-2018

Indikator Kualitas Perumahan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Lantai bukan tanah (%)	96,01	98,51
Atap beton, genteng, sirap, seng, dan asben (%)	90,88	93,09
Dinding terluas tembok dan kayu (%)	97,59	99,8

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Dari hasil Susenas 2017, rumah tinggal dengan atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes mencapai 97,44 persen dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 93,09 persen. Selain itu, penggunaan dinding terluas yang terbuat dari tembok dan kayu juga meningkat dari 97,59 persen di tahun 2017 menjadi 99,8 persen di tahun 2018. Dari 3 indikator yang telah disebutkan mengindikasikan bahwa masyarakat telah tinggal dengan kualitas rumah tempat tinggal yang semakin baik dan memenuhi kriteria yang layak huni.

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal dan layak. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Beberapa fasilitas perumahan yang mendukung tempat tinggal yang layak dan sehat adalah air minum yang sehat, jamban sendiri, sumber penerangan listrik, dan penggunaan gas elpiji untuk bahan bakar memasak. Pada tahun 2018, rumah tangga di Kabuapten Luwu Timur yang menggunakan air bersih sebagai sumber air minum mencapai 67,63 persen atau menurun 0,31 poin persen dibanding tahun 2017 (67,94 persen). Namun rumah tangga yang menggunakan air layak sebagai sumber air minum hanya 34,91 persen.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Luwu Timur, 2017-2018

Fasilitas Perumahan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Air Minum Bersih	67,94	67,63
Air Minum Layak	32,06	34,91
Jamban Sendiri	74,03	77,82
Sumber Penerangan Listrik	94,89	100

*Air Minum Bersih : air kemasan, ledeng, sumber air terlindungi dengan syarat jarak tempat penampungan terdekat (limba) > 10 m.

**Air Minum Layak : air minum bersih + air hujan – air kemasan

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat

dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjangkau dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil Susenas, menurut status kepemilikan rumah tempat tinggal, porsi rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri yaitu sebesar 85,12 persen di tahun 2018, angka ini naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 80,08 persen. Sedangkan 16,39 persen sisanya menempati rumah kontrak/sewa sebanyak, bebas sewa, dan rumah dinas/lainnya sebanyak. Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki tempat tinggal sendiri mengindikasikan semakin meningkatnya penduduk Kabupaten Luwu Timur yang mampu beli rumah.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Luwu Timur, 2017-2018

Status Kepemilikan Rumah Tinggal	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	80,08	85,12
Bukan Milik Sendiri	19,92	14,88

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur

BAB VII

KEMISKINAN

Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan memberikan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat di wilayah tersebut. Namun terkadang, pertumbuhan ekonomi yang terjadi kurang dapat terdistribusi dengan merata sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat bahkan menyisakan masalah kemiskinan untuk sebagian masyarakat karena kurangnya kemampuan dalam mengakses baik sumber daya dan faktor produksi yang tersedia maupun hasil yang telah dicapai dalam pembangunan ekonomi tersebut.

Untuk mengetahui tingkat kemiskinan yang terjadi, beberapa metode yang biasa digunakan adalah Head Count Index. Menurut metode ini, penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut dengan garis kemiskinan. Dengan demikian sebelum menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, terlebih dahulu harus dihitung garis kemiskinanannya.

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan hidup minimum makanan (beras, umbi-umbian, ikan dan sebagainya) maupun kebutuhan hidup minimum bukan makanan (perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya).

Untuk pengeluaran makanan, nilai rupiah minimum yang dibutuhkan oleh seseorang dapat dikatakan hidup layak atau sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya sebesar 2100 kilo kalori per hari.

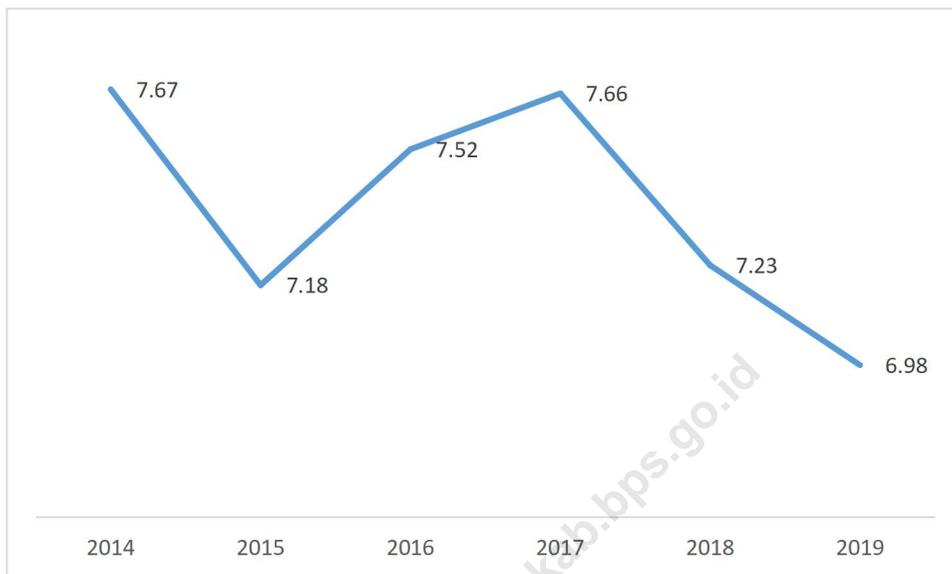
Agar seseorang dapat dikatakan hidup layak, pemenuhan kebutuhan makanan saja tidak cukup. Oleh karena itu perlu juga dipenuhi kebutuhan dasar bukan makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian serta aneka barang dan jasa lainnya. Batas kebutuhan minimum untuk makanan ditambah kebutuhan minimum untuk bukan makanan itulah yang disebut dengan Garis Kemiskinan (GK). Singkatnya, garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Jika pengeluaran seseorang berada di bawah garis kemiskinan tersebut maka orang tersebut akan dikategorikan miskin.

Selain itu, secara umum garis kemiskinan juga dibedakan menurut wilayah yaitu berdasarkan desa/kota dimana masing-masing wilayah memiliki garis kemiskinan yang berbeda juga. Perbedaan yang terjadi didasari oleh asumsi bahwa tingkat kecukupan untuk hidup layak yang berbeda antara kota dan desa sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan antara garis kemiskinan antar kota dan desa.

Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren menurun selama periode 2013-2019. Pemerintah tentunya terus berupaya menekan angka kemiskinan. Secara umum, dari tahun 2013 hingga Maret 2019 persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan. Tahun 2019 (periode Maret), jumlah penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur sebesar 7,23 persen (21,14 ribu jiwa) dari seluruh penduduk Kabupaten Luwu Timur.

Gambar 7.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur, 2014-2019



Sumber : Publikasi Data Strategis Kabupaten Luwu Timur 2020

Melihat perbandingan trennya dengan angka nasional, angka kemiskinan Kabupaten Luwu Timur cenderung memiliki tren yang sama dengan angka Sulawesi Selatan. Perlu diapresiasi bahwa angka kemiskinan Kabupaten Luwu Timur selalu berada di bawah angka Sulawesi Selatan. Untuk periode ini, baik angka kemiskinan Sulawesi Selatan maupun Luwu Timur sama- sama mengalami penurunan.

Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

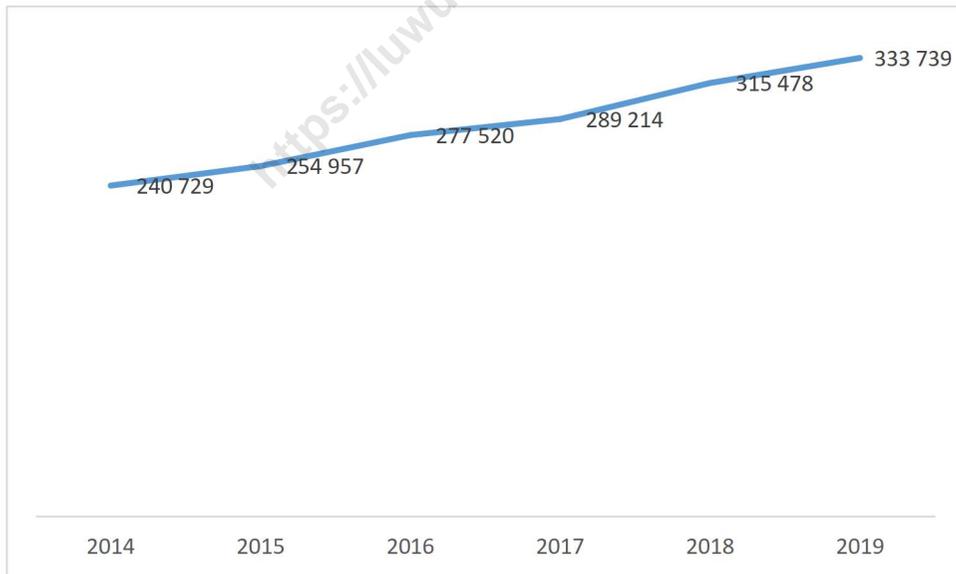
Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Luwu Timur sendiri mengalami peningkatan setiap tahun. Selama periode 2017-2018

kenaikan garis kemiskinan sebesar Rp 18.261 yaitu dari Rp 315.478 di Maret 2018 menjadi Rp 333.739 di Maret 2019. Salah satu penyebab kenaikannya tentunya adalah inflasi yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur.

Selain Garis Kemiskinan (GK), indeks yang digunakan untuk melihat indikator lain dari kemiskinan yaitu indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman mengandung arti sejauh mana rata-rata pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan.

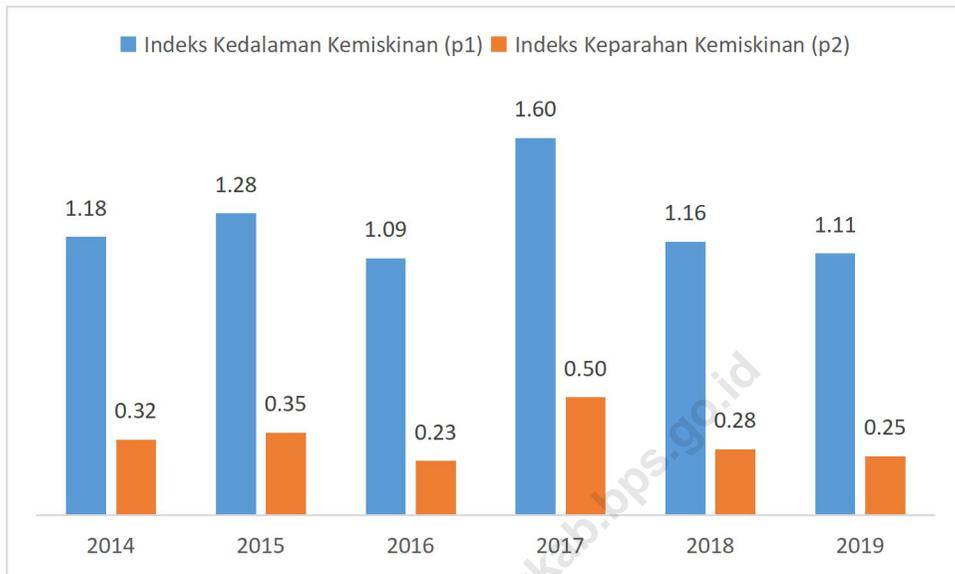
Indeks Kedalaman Kemiskinan/*Poverty Gaps Index* (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan.

Gambar 7.2 Garis Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur, 2014-2019



Sumber : Publikasi Data Strategis Kabupaten Luwu Timur 2020

Gambar 7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Luwu Timur 2014-2019



Sumber : Publikasi Data Strategis Kabupaten Luwu Timur 2020

P1 Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari periode Maret 2018 ke Maret 2019, dimana nilainya sebesar 1,6 turun menjadi 1,11. Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Sementara itu untuk melihat masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin digunakan ukuran Poverty Severity Index (P2). Indeks ini secara sederhana merupakan jumlah dari *poverty gap* tertimbang yang penimbangnya sebanding dengan *poverty gap* itu sendiri. Dengan mengkuadratkan *poverty gap*, indeks ini secara implisit memberikan penimbang yang lebih pada unit observasi yang makin jauh di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. P2 mengalami penurunan juga dari periode Maret 2018 (0,28) hingga Maret 2019 (0,25).

<https://luwutimurkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Puncak Indah, Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Telp : (0474) 3220038 Email: bps7325@bps.go.id
Homepage : <http://luwutimurkab.bps.go.id>

ISBN 978-602-6842-35-0

